

Implementasi Program Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Jayapura

Siti Fatimah¹, Usman Pakasi², Elvira Usulu³, Yuliati Kala Padang⁴

Universitas Yapis Papua, Jl. Dr. Samratulangi No.11 Dok V Atas Jayapura, Papua

Corresponding Author: fatimah.halim67@gmail.com

Keyword:

Implementation;
Program;
Development Plan
Deliberation.

Abstract:

The purpose of this research is to look at the process and output of development planning deliberations in the physical field of facilities and infrastructure, the sociocultural field, the economic sector, and the government sector. The research method used is qualitative descriptive in Trikora Village, North Jayapura District, Jayapura City. The results of the study show that both the process and output aspects for each field: physical facilities and infrastructure, the sociocultural sector, the economic sector, and the government sector are running according to the mutual agreement during the development planning meeting. We suggest that the quality of planning should be improved for each sector: physical facilities and infrastructure, sociocultural sector, economic sector, and government sector. Good quality planning will have an impact on community development in Trikora Village, North Jayapura District, Jayapura City.

Kata Kunci:

Implementasi;
Program;
Musrenbang.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat proses dan output musyawarah perencanaan pembangunan bidang fisik sarana dan prasarana, bidang sosial budaya, bidang ekonomi dan bidang pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pada aspek proses maupun output untuk setiap bidang: fisik sarana dan prasarana, bidang sosial budaya, bidang ekonomi dan bidang pemerintahan berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat musrenbang. Kami menyarankan agar dilakukan peningkatan kualitas perencanaan untuk setiap bidang: fisik sarana dan prasarana, bidang sosial budaya, bidang ekonomi dan bidang pemerintahan. Kualitas perencanaan yang baik akan berdampak terhadap pembangunan masyarakat di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu hal yang harus dilakukan agar masyarakat dapat menikmati hasil yang telah dilakukan demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan tidak terlepas dari suatu perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya (Yunas, 2017). Agar tercapainya tujuan tersebut maka pembangunan harus diimplementasikan dalam bentuk program kerja yang harus dilaksanakan (Manghayu, 2018). Oleh karenanya program-program yang telah diusulkan harus terlebih dahulu dibicarakan melalui musyawarah bersama. Musyawarah diperlukan karena merupakan wujud dari pemufakatan masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan pemerintahan (Azhar, 2015).

Dalam wujud pembangunan, setiap daerah mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pemerintahan terkecil berbeda program kerja dan pelaksanaannya. Pembangunan di tingkat pusat dari segi pelaksanaannya membutuhkan waktu dan perencanaan yang lebih besar begitupun di tingkat yang terkecil, dalam hal ini tingkat kelurahan (Paselle, 2017). Pada tingkat kelurahan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan

pembangunan tingkat kelurahan atau biasa di singkat musrenbang kelurahan (Sulaiman et al, 2017 dan Muhtadi, 2021).

Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan dilaksanakan oleh tim penyelenggara musrenbang kelurahan yang telah dibentuk atau ditetapkan sebelumnya oleh kepala kelurahan, yang pesertanya berasal dari sejumlah komponen masyarakat baik individu maupun kelompok seperti ketua RT/RW, Lembaga- lembaga masyarakat, organisasi masyarakat, Tokoh-tokoh masyarakat dan lainnya yang berada di lingkungan tersebut (Mawengkang et al, 2021). Semua peserta mengusulkan dan memaparkan program utama yang akan dikerjakan dan yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan oleh masing-masing peserta kelompok sebagai pengusul (Basri et al, 2021).

Musyawarah perencanaan pembangunan juga yang merupakan agenda tahunan dimana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang dihadapi di lingkungan masyarakat dan masyarakat memutuskan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan (Farid & Fithriana, 2016 dan Salangka, 2020). Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, yang mana usulan-usulan tersebut dikategorisasikan berdasarkan bidang-bidang dan alokasi anggaran. Kelurahan Trikora merupakan kelurahan yang berada di wilayah Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura. Pada musrenbang tahun 2020 kelurahan Trikora mengusulkan program kerja terdiri dari bidang fisik sarana dan prasarana, bidang sosial budaya, bidang ekonomi dan bidang pemerintahan, yang dihadiri kurang lebih seratus orang dari perwakilan masing-masing kelompok.

Rangkaian kegiatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, dimulai dari RT/RW dan kelompok masyarakat mengadakan diskusi serta musyawarah yang hal tersebut kemudian dilaporkan ke kepala kelurahan untuk kemudian disusun jadwal penyelenggaraan Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan.

Adapun masalah yang terjadi dalam pembangunan di kelurahan Trikora yaitu tidak adanya komunikasi yang intens antara pihak perangkat daerah dengan pihak kelurahan mengenai realisasi program pembangunan yang dilakukan oleh pihak perangkat daerah sehingga pihak kelurahan tidak tahu program mana saja yang sudah dikerjakan dan adapun program yang dijalankan tidak sesuai dengan lokasi yang telah dibahas dalam rapat musrenbang sebelumnya hal itu menyebabkan usulan tersebut kembali diusulkan pada rapat musrenbang di tahun berikutnya.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bermaksud menelusuri unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir permasalahan penelitian. Fokus penelitian ini adalah bidang-bidang yang merupakan usulan pembahasan program dalam musrenbang yaitu bidang fisik sarana dan prasarana, bidang sosial budaya, bidang ekonomi dan bidang pemerintahan di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura. Informan pada penelitian ini ada Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Staff dan tokoh masyarakat.

HASIL DAN DISKUSI

Proses

1. Proses pada Bidang Fisik Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan program hasil musrenbang bidang sarana prasarana fisik yang lolos dalam pengajuan, masih ada yang pada akhirnya ditangguhkan pada tahun berikutnya, seperti program perbaikan jalan antar wilayah tingkat RW karena selain besaran dana yang dibutuhkan tidak sesuai sehingga tidak ada pihak ketiga yang bersedia melaksanakannya.

Proses pelaksanaan program hasil musrenbang dalam bidang sarana prasarana fisik secara umum berjalan baik dan sesuai rencana awal, namun ada volume kegiatan yang dikurangi karena pagu anggaran yang tidak sesuai dengan rencana awal seperti pengadaan meubel berupa meja kursi, dari 10 unit yang direncanakan, pada pelaksanaannya hanya 7 unit meja kursi yang dapat direalisasikan, bahkan ada 1 program yang dialihkan karena ketidaksesuaian pagu anggarannya.

2. Proses pada Bidang Sosial dan Budaya

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut dari beberapa informan, dapat digambarkan bahwa Proses program dari hasil musrenbang bidang sosial budaya ada beberapa yang lolos sampai pada tahap musrenbang tingkat kota diantaranya adalah bantuan pengadaan alqurán, infokus bagi gereja, bantuan social bagi masyarakat miskin, pelatihan pemanfaatan halaman dengan tanaman hidroponik, yang telah selesai dilaksanakan adalah pengadaan Alqurán untuk Mesjid dan pemberian infokus untuk gereja, pengkaderan posyandu, pelatihan pengolahan makanan dari bahan sagu, sementara untuk pelatihan pemanfaatan halaman dengan tanaman hidroponik belum dilaksanakan.

Proses pelaksanaan program hasil musrenbang di kelurahan Trikora secara umum telah berjalan sesuai ketetapan, adapun program yang belum disetujui bukan karena ditolak tetapi lebih pada penundaan, karena pada masa pandemic saat ini, adanya pengalihan anggaran pada penanganan covid-19 sehingga program yang dipandang belum terlalu prioritas, untuk sementara waktu bias ditangguhkan.

3. Proses pada Bidang Ekonomi

Pemberian bantuan bagi masyarakat pelaku usaha kecil sejauh ini belum dilaksanakan, karena pendataan yang dilakukan belum tuntas dan masih adanya masyarakat yang tahun lalu sudah memperoleh masih mengajukan sementara hal ini diprioritaskan bagi masyarakat yang belum memperoleh pada tahun lalu. Pada prosesnya pelaksanaan program ini adalah pada penentuan siapa saja yang bisa menerima bantuan tersebut, terutama bantuan modal usaha, jangan sampai terulang lagi pada tahun sebelumnya, dimana masyarakat yang sudah mendapat bantuan modal usaha tapi pada tahun berikutnya masih mendapatkan bantuan, sementara ada beberapa masyarakat yang masuk dalam kategori penerima tetapi sampai saat ini belum memperoleh manfaat dari program tersebut, perlu diberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat, khususnya yang pernah menerima bantuan modal usaha, agar mekanismenya diatur bahwa prioritas sasaran program pada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan modal usaha atau sistem bergilir.

Berkaitan dengan proses hasil musrenbang tingkat kelurahan, telah disepakati beberapa program pada bidang sarana prasarana fisik, namun sebagian dari usulan tersebut ada yang tidak terakomodir pada musrenbang tingkat distrik, sehingga pada prosesnya program yang dilaksanakan sesuai dengan daftar program yang diakomodir sampai pada musrenbang tingkat kota. Pelaksanaan program hasil musrenbang bidang sarana prasarana fisik yang lolos dalam pengajuan, masih ada yang pada akhirnya ditangguhkan pada tahun berikutnya, seperti program perbaikan jalan antar wilayah tingkat RW karena selain besaran dana yang dibutuhkan tidak sesuai sehingga tidak ada pihak ketiga yang bersedia melaksanakannya

Proses pelaksanaan program hasil musrenbang dalam bidang sarana prasarana fisik secara umum berjalan baik dan sesuai rencana awal, namun ada volume kegiatan yang dikurangi karena pagu anggaran yang tidak sesuai dengan rencana awal seperti pengadaan meubel berupa meja kursi, dari 10 unit yang direncanakan, pada pelaksanaannya hanya 7 unit meja kursi yang dapat direalisasikan, bahkan ada 1 program yang dialihkan karena ketidaksesuaian pagu anggarannya. Realisasi program dari hasil musrenbang bidang social budaya ada beberapa yang lolos sampai pada tahap musrenbang tingkat kota diantaranya adalah bantuan pengadaan alqurán, infokus

bagi gereja, bantuan social bagi masyarakat miskin, pelatihan pemanfaatan halaman dengan tanaman hidroponik, yang telah selesai dilaksanakan adalah pengadaan Alqurán untuk Mesjid dan pemberian infokus untuk gereja, pengkaderan posyandu, pelatihan pengolahan makanan dari bahan sagu, sementara untuk pelatihan pemanfaatan halaman dengan tanaman hidroponik belum dilaksanakan.

Proses pelaksanaan program hasil musrenbang di kelurahan Trikora secara umum telah berjalan sesuai ketetapan, adapun program yang belum disetujui bukan karena ditolak tetapi lebih pada penundaan, karena pada masa pandemic saat ini, adanya pengalihan anggaran pada penanganan covid-19 sehingga program yang dipandang belum terlalu prioritas, untuk sementara waktu bias ditangguhkan. Pemberian bantuan bagi masyarakat pelaku usaha kecil sejauh ini belum dilaksanakan, karena pendataan yang dilakukan belum tuntas dan masih adanya masyarakat yang tahun lalu sudah memperoleh masih mengajukan sementara hal ini diprioritaskan bagi masyarakat yang belum memperoleh pada tahun lalu. Pada prosesnya pelaksanaan program ini adalah pada penentuan siapa saja yang bisa menerima bantuan tersebut, terutama bantuan modal usaha, jangan sampai terulang lagi pada tahun sebelumnya, dimana masyarakat yang sudah mendapat bantuan modal usaha tapi pada tahun berikutnya masih mendapatkan bantuan, sementara ada beberapa masyarakat yang masuk dalam kategori penerima tetapi sampai saat ini belum memperoleh manfaat dari program tersebut, perlu diberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat, khususnya yang pernah menerima bantuan modal usaha, agar mekanismenya diatur bahwa prioritas sasaran program pada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan modal usaha atau system bergilir

Kegiatan yang harus direalisasikan dan masuk pada program prioritas pada bidang ini diantaranya adalah Pendataan penduduk berbasis IT, pengadaan papan nama jalan, papan nama ketua RT dan RW serta pengadaan papan nama untuk batas wilayah antar RT dan RW. Pembangunan kantor kelurahan dan penyelesaian sertifikat dan penyelesaian pelepasan tanah, ada beberapa kegiatan yang cenderung berulang-ulang pada setiap tahunnya, seperti pengadaan papan nama jalan, papan nama ketu RT dan RW juga pengadaan papan batas wilayah RT dan RW, pada prosesnya perlu memperhatikan kualitas, terutama kualitas bahan agar tahan lama sehingga tidak perlu dianggarkan setiap tahun. Program yang paling prioritas dan harus segera direalisasikan pada bidang pemerintahan adalah pendataan penduduk berbasis IT, karena program tersebut berpengaruh terhadap data perkembangan penduduk yang sangat pesat dan penentuan jumlah penduduk wajib e-KTP.

Keluaran

1. Keluaran Bidang Fisik Sarana dan Prasarana

Output yang diharapkan dari pelaksanaan program hasil musrenbang pada bidang sarana prasarana fisik diantaranya adalah dalam upaya pencapaian standar pelayanan minimum bagi aparatur kelurahan yang diharapkan dapat lebih maksimal dalam memberikan pelayanannya, mampu memenuhi kebutuhan khususnya kelengkapan sarana prasarana pendukung baik bagi aparatur kelurahan maupun bagi masyarakat, sehingga aktivitas pemerintahan berjalan baik dan sesuai harapan dari semua pihak. Pada pelaksanaan program hasil musrenbang diantaranya adalah tercapainya penataan sarana prasarana fisik yang baik pada kantor kelurahan Trikora, sehingga dapat lebih memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menuju pada pelayanan prima sesuai apa yang diharapkan masyarakat.

2. Keluaran Bidang Sosial Budaya

Berdasarkan pada hasil dengan informan, digambarkan bahwa luaran pelaksanaan program hasil musrenbang di kelurahan Trikora secara khusus pada bidang social budaya yaitu terciptanya kehidupan sosial budaya yang baik sesuai dengan kearifan local yang ada dan meningkatnya potensi kehidupan masyarakat yang rukun dan bertoleransi tinggi antar warga, budaya saling menghormati dan menghargai antar warga menjadi tolok ukur output dari kehidupan social budaya, secara umum bermuara pada visi dan misi kelurahan bidang kehidupan bermasyarakat dengan semangat dan jiwa gotong royong sebagai cerminan kehidupan yang baik.

3. Keluaran Bidang Ekonomi

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan informan, dapat digambarkan berkaitan dengan Luaran yang diharapkan dalam pelaksanaan program kerja hasil musrenbang di kelurahan Trikora khususnya pada bidang ekonomi diantaranya adalah bagaimana masyarakat dapat diberdayakan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya, sehingga menjadi masyarakat yang mandiri, bahwa tujuan utama jalannya pemerintahan adalah terbentuknya masyarakat sejahtera baik secara ekonomi, social, budaya dan bidang lainnya. Output pelaksanaan program bidang ekonomi secara umum ditargetkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan pola pemberdayaan masyarakat, untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan ekonomi masyarakat, untuk mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat dan untuk meningkatkan daya saing ekonomi.

4. Keluaran Bidang Pemerintahan

Output yang diharapkan dari pelaksanaan program kerja hasil musrenbang bidang pemerintahan, yaitu diantaranya tertib administrasi dan pencapaian standar pelayanan prima dari aparatur pemerintah kepada masyarakat selaku pengguna layanan, meningkatnya kinerja pegawai sehingga kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur kelurahan semakin tinggi dengan dukungan sarana prasarana yang memadai. Program kerja bidang pemerintahan diharapkan dapat mewujudkan good government dan clean government dengan penarapan prinsip-prinsipnya secara maksimal, ini merupakan tolok ukur utama dibentuknya organisasi pemerintahan khususnya pada tingkat kelurahan.

Keluaran (*output*) adalah apa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Jadi menurut kami, antara Perencanaan, Keuangan dan SAKIP tidak terdapat perbedaan pemahaman mengenai istilah keluaran dan hasil. Tapi itu baru di level peraturan tertulis, sementara untuk di tataran pelaksana sangat mungkin terjadi perbedaan pemahaman.

Pembangunan fisik dan juga beberapa kegiatan non fisik seperti analisis dan kajian tidak mungkin selesai dalam waktu sebulan dua bulan. Dengan pagu anggaran yang cukup besar, banyak kegiatan yang baru selesai menjelang akhir tahun anggaran karena harus melalui berbagai tahapan terlebih dahulu. Dengan kondisi tersebut, maka keluaran/output sebuah kegiatan dalam tentu sudah dapat diketahui bahkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Tetapi hasil dari kegiatan itu tentu baru dapat dirasakan dan dinilai setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Kecuali kita menyajikan data asal-asalan, maka proses penilaian hasil yang baru selesai di bulan Oktober misalnya, tentu baru dapat kita lakukan di Januari Tahun berikutnya. Misalnya dengan diperbaikinya jembatan, maka indikator hasil seperti peningkatan kelancaran lalu lintas yang ditunjukkan dengan penurunan angka/tingkat kemacetan dapat diturunkan, tentu baru bisa diukur setelah beberapa hari, minggu atau bahkan bulan dipergunakan masyarakat.

KESIMPULAN

Proses hasil musrenbang pada Bidang Sarana dan Prasarana Fisik diantaranya pengadaan meubel berupa meja kursi untuk pegawai, pengecatan pagar kantor kelurahan, pengecatan jalan, pemasangan papan nama ketua RT dan RW serta pemasangan batas wilayah antar RT dan RW; pada Bidang Sosial Budaya adalah pengadaan Alquran untuk masjid, Infokus untuk gereja dan berbagai pelatihan keterampilan bagi masyarakat, pada Bidang Ekonomi adalah bantuan modal usaha, bantuan sosial Dan pada Bidang Pemerintahan pendataan warga berbasis IT, penertiban administrasi dan penyelesaian sertifikasi kantor kelurahan.

Keluaran pelaksanaan program hasil musrenbang Bidang Sarana dan Prasarana fisik adalah upaya pencapaian standar pelayanan minimum bagi aparaturnya kelurahan, tercapainya penataan sarana prasarana fisik yang baik pada kantor kelurahan Trikora. Bidang Sosial Budaya terciptanya kehidupan social budaya yang baik sesuai dengan kearifan local, kehidupan masyarakat yang rukun dan bertoleransi tinggi antar warga. Bidang Ekonomi terbentuknya masyarakat sejahtera, tangguh dan mandiri serta memiliki daya saing. Bidang Pemerintahan tertib administrasi dan pencapaian standar pelayanan prima dari aparaturnya pemerintah kepada masyarakat, meningkatnya kinerja pegawai sehingga kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparaturnya, mewujudkan *good government* dan *clean government*.

REFERENSI

- Azhar, F. (2015). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2).
- Basri, H., Budi, H., & Teniro, A. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan Kebijakan Pada Musrenbang Kampung. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 25-32.
- Farid, M., & Fithriana, N. (2016). Implementasi Kebijakan Musyawarah Erencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumenep. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 5(2).
- Manghayu, A. (2018). Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penerapan e-musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(5), 95-115.
- Mewengkang, A. J., Singkoh, F., & Sampe, S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Tahun 2016. *Governance*, 1(2).
- Muhtadi, T. Y. (2021). Pendampingan Masyarakat Sebagai Fasilitator Dalam Memandu Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 342-348.
- Paselle, E. (2017). Perencanaan Pembangunan Partisipatif: Studi Tentang Efektivitas Musrenbang Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. *Jurnal Paradigma (JP)*, 2(1), 10-25.
- Salangka, W. P. (2020). Partisipasi masyarakat dalam musrenbang di desa malola kecamatan kumelembuai kabupaten minahasa selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 9(3).
- Sulaiman, A. I., Lubis, D. P., Susanto, D., & Purnaningsih, N. (2015). Komunikasi Stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 31(2), 367-378.
- Yunas, N. S. (2017). Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 19-27.